

DPC MASIH TUNGGU REKOMENDASI

Butet Dukung PDIP di Pilkada Gunungkidul

WONOSARI (KR) - Butet Kartaredjasa bersama dengan belasan seniman Yogyakarta berkunjung ke Gunungkidul. Dalam kunjungannya langsung diterima oleh Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih SE yang juga Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Senin (1/6). Berbagai hal dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dunia seni hingga politik. Butet dengan tegas mengatakan siap mendukung sepenuhnya pesta demokrasi tingkat daerah. "Kami siap mendukung dan mendukung Pilkada yang akan diusung PDI Perjuangan," kata Butet Kartaredjasa. Butet mengaku memiliki kedekatan tersendiri dengan Srikandi Pimpinan DPRD Gunungkidul ini. Sehingga rela datang ke Gunungkidul untuk memberikan dukungan calon yang akan diusung partai



Butet Kartaredjasa berbincang dengan Endah Subekti.

berlambangkan kepala bangent moncong putih. "Ibarat kakak adik, kami dukung kiprah PDI Perjuangan di panggung Pilkada Gunungkidul. Banyak hal yang bisa dikerjakan untuk pemimpin Gunungkidul ke depan mulai dari penataan pariwisata, infrastruktur, ekonomi dan yang lain. Sehingga membawa kemanfaatan bagi masyarakat," ucapnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul Endah

Subekti Kuntariningsih menyampaikan terima kasih atas dukungan ini. PDIP akan membuktikan keseriusan untuk mempersiapkan Pilkada Gunungkidul.

"Memang DPC PDIP masih menunggu rekomendasi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Namun untuk tahapan sudah berjalan di PDIP. Dalam waktu dekat rekomendasi pilkada dipastikan akan segera turun," ucapnya. (Ded)-d

DESA DIMINTA VERIFIKASI DATA

6.584 Bantuan Sosial Tunai Kemensos Invalid

WONOSARI (KR) - Komisi D DPRD Gunungkidul memanggil pemerintah menyusul ruwetnya penyaluran jaringan pengamanan sosial masyarakat dalam mengatasi dampak ekonomi Covid-19. Jenis bantuan yang banyak, menyebabkan tumpang tindihnya data sehingga penyaluran tidak berjalan lancar. Bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul senilai Rp 10,1 miliar yang mestinya sudah terbagi bulan April dan Mei hingga sekarang masih macet. Setelah dilakukan pengecekan, ada 594 keluarga penerima manfaat (KPM) APBD dan 6.584 BST kemensos yang invalid.

"Data tersebut sudah dikirim ke kepala-kepala desa untuk dapat dicarikan pengganti keluarga yang tidak mampu tetapi belum mendapatkan bantuan. "Semua bantuan ini ditargetkan paling lambat minggu depan sudah dapat cair," kata Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Drs H Supriyadi didampingi Wakil Ketua DPRD Heri Nugroho SS, Selasa (2/6).

Untuk mengatasi ruwetnya penyaluran bantuan sosial Komisi D mengundang eksekutif yang dihadiri Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asek I), Drs Sigit Purwanto, Asek III Ir Anik Indarwati MSi, Kepala Dinas Sosial Dra Siwi Iriyani MSi, Kepala Dinas P3AKB dan PMD Gunungkidul Sujoko MSi, Kepala Bappeda Sri Su-

hantanta SIP MSi, Kepala Dinas Kominfo, Kabag Kesra dan perwakilan kepala desa dari Kecamatan Semin dan Playen. "Dewan meminta eksekutif segera mengeksekusi bantuan, semakin lambat semakin ruwet



Rapat Komisi D DPRD Gunungkidul.

KR-Endar Widodo

POSKO PENYEKATAN PERBATASAN DIPERPANJANG

Selama Sebulan, 1.152 Pemudik Diminta Putar Balik

WONOSARI (KR) - Kepolisian Resor Gunungkidul memperpanjang operasi penyekatan Covid-19 di dua pintu perbatasan masing-masing di pos Kecamatan Patuk dan Pos Bedoyo Kecamatan Ponjong. Kebijakan ini dilakukan sesuai dengan Maklumat Kapolri untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19.

"Kedua pintu masuk Kabupaten Gunungkidul itu masih kita diterapkan penyekatan," kata Kaur Bin Ops (KBO) Satlantas Polres Gunungkidul, Iptu Kusnan Priyono, Selasa (2/6).

Dijelaskan Kasubbag Humas Polres Gunungkidul, Iptu Enny Nur Widiastuti sejak Posko penyekatan ini dilakukan, terdapat 25 kendaraan

an roda dua (motor) dan 180 mobil yang diminta putar balik. Dari kendaraan-kendaraan yang diminta putar balik tersebut terdapat sebanyak 1.152 penumpang yang tidak boleh masuk ke Gunungkidul.

Pelaksanaan penyekatan tersebut juga dilakukan bertepatan dengan Operasi Ketupat 2020 yang terkait dengan larangan mudik. Dalam pelaksanaan kegiatan menindaklanjuti Maklumat Kapolri itu pihak kepolisian membentuk tim gabungan dilanjutkan dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

"Pelaksanaan KRYD terhitung sejak 31 Mei 2020 lalu sampai dengan 7 Juni mendatang," ujarnya.

Salah satu pertimbangan di-

karena kondisi di lapangan semakin sulit," tambah Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho SS.

Sejumlah kepala desa mengeluhkan kondisi lapangan, karena banyak data yang tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan. Ada bantuan yang tidak bisa dicairkan karena orangnya sudah tidak ada atau sebab lain, sementara masih banyak warga yang tidak mampu belum menerima bantuan. Atas kenyataan ini Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Drs H Supriyadi dapat diatasi dengan APBD dan BST yang invalid. "Sehingga kepala desa dapat segera mengajukan usulan warga yang terdampak Covid-19 segera menerima bantuan," ujarnya. (Ewi)-d

Dispar Belum Berencana Buka Destinasi Wisata

WATES (KR) - Dinas Pariwisata (Dispar) Kulonprogo belum berencana membuka destinasi wisata yang ada di wilayahnya. Pembukaan destinasi wisata di tengah pandemi Covid-19 menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dispar DIY.

Sekretaris Dispar Kulonprogo, Nining Kuswantari mengatakan pembukaan destinasi wisata telah ada kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi Dispar Kabupaten/Kota se-DIY. Kabupaten masih menunggu SK Gubernur DIY dan SOP sektor pariwisata tentang keberlakuan baru atau *New Normal*. "Untuk menyiapkan SOP keberlakuan baru di masa pandemi Covid-19, menunggu SK Gubernur DIY dan SOP Dispar DIY. Dispar Kabupaten/Kota tidak dapat membuat SOP sendiri," ujar Nining Kuswantari, Selasa (2/6).

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dispar Kulonprogo, Muhammad Juaini menyatakan belum dapat memastikan, pembukaan destinasi wisata di Kulon-

progo. Penutupan sejumlah destinasi wisata dalam rangka pencegahan penyebaran virus Korona.

Di tengah pandemi Covid-19, katanya, sejak Maret 2020 sejumlah destinasi wisata yang dikelola Pemkab Kulonprogo ditutup. Untuk pembukaan kembali menyesuaikan hendak dilakukan kabupaten/kota lain di DIY.

Menurutnya, draft SOP pariwisata sedang pembahasan Dispar DIY. "Destinasi wisata sampai sekarang masih tutup. Dispar Kabupaten masih menunggu SOP pariwisata dari Dispar DIY," jelasnya.

Dikatakan, Dispar Kulonprogo telah melakukan penyesuaian pendapatan daerah dari sektor pariwisata di Kulonprogo. Dampak pandemi Covid-19, pendapatan daerah dari sekitar Rp 5 miliar pada 2020 mengalami penurunan sekitar 50 persen. Target sekitar Rp 2,5 miliar setelah perubahan diperkirakan sulit tercapai. Bersamaan penutupan destinasi wisata di tengah pandemi Covid-19, pendapatan daerah selama tiga bulan terakhir Rp 0. (Ras)-d

SEJUMLAH DESA NYATAKAN SIAP

BLT Tahap Kedua Segera Diserahkan

WONOSARI (KR) - Bantuan Langsung Tunai (BLT) masing-masing sebesar Rp 600 ribu pada tahap kedua akan segera dicairkan di tengah masa Tanggap Darurat saat ini. Dari sebanyak 144 desa sebagian sudah melaporkan kesiapannya dan pemkab akan terus melakukan pendampingan dan monitoring untuk mencegah terjadinya keresahan di masyarakat. "Rencananya sudah ada beberapa desa yang saat ini sudah siap pencairan BLT tahap dua," kata Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKB/PMD) Gunungkidul, Subiyantoro, Jumat (29/5) lalu.

Dari laporan yang masuk sudah ada 32 desa yang saat ini sudah siap melakukan pembagian BLT tahap kedua. Di antara desa-desa yang sudah melakukan konsultasi dengan pemkab yakni Desa Sawahan, Tambakromo, Sidorejo, Karangasem, Mulo, Wonosari, Balong, Jepitu, Pilangrejo, Nalah, Watugajah dan Serut.

Dari laporan tersebut maka untuk anggaran dana desa juga sudah ditransfer ke rekening desa. Dengan pencairan BLT tahap kedua ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Dalam seleksi penerima bantuan ini dilakukan pemerintah desa dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Khususnya bagi mereka

yang sangat membutuhkan. Diakuinya bahwa hingga saat ini masih ada desa yang belum menyelesaikan pemberian BLT dan ada juga desa yang menyerahkan bersamaan pada tahap pertama dan kedua.

BLT ini jika pemerintah memprosentasikan secara maksimal bantuan Rp 600 ribu per bulan untuk 3 bulan anggaran yang akan dikucurkan sebesar Rp 42.504.912.709, untuk penerima manfaat sebanyak 23.614 Kepala Keluarga (KK). Terkait dengan rencana pemerintah pusat akan memperpanjang BLT selama 6 bulan pihaknya belum berkomentar. Tetapi jika kebijakan tersebut memang ada pemkab siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Bmp)-d

Komunitas KJFC Bagikan Sembako

LENDAH (KR) - Pecinta mobil Katana dan Jimny di wilayah DIY tergabung dalam 'Katana Jimny Fans Club' (KJFC) menggelar bakti sosial (baksos) dengan menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak pandemi virus Korona di Kalurahan Ngentakrejo Kapanewon Lendah, Minggu (31/5).

Sesepuh KJFC, Saridjo, meyakini pembagian sembako tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi penerima ganda, lantaran sebelum pembagian pihaknya berko-

ordinasi dengan pemerintah kalurahan setempat dan melakukan pengecekan di lapangan.

"Kami berupaya maksimal agar pemberian bantuan tidak *double* dan tepat sasaran. Caranya kami minta data warga kurang mampu yang terdampak pandemi virus Korona yang belum mendapat bantuan kepada Pemerintah Kalurahan Ngentakrejo. Setelah itu tim kami melakukan pengecekan di lapangan kemudian dilanjutkan pembagian sembako," kata Sa-

ridjo.

KJFC merupakan wadah para penggemar mobil Katana dan Jimny di wilayah DIY, komunitas tersebut dibentuk enam tahun silam dan berada di bawah naungan *Indonesia Offroad Federation*. "Jadi selain rutin mengadakan *offroad* dengan medan yang cukup menantang dan membangkitkan adrenalin peserta, kami juga hampir setiap tahun mengadakan bakti sosial untuk meringankan beban hidup masyarakat kurang mampu," ujarnya didampingi salah satu pengurus KJFC Kulonprogo, Mbah To.

Sementara itu Ketua Panitia Baksos KJFC, Dani Wirawan Saputra mengatakan, dalam pembagian sembako pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pengurus dan anggota komunitas tersebut selama mengikuti kegiatan diwajibkan mengenakan masker dan *physical distancing* atau jaga jarak. (Rul)-d



KR-Arsul Sani

Keluarga Besar KJFC baksos di Ngentakrejo.

POSKO 'KAMPUNG KULO SIAGA' DIRESMIKAN

Kapolda DIY : Efektif untuk Pengawasan

WATES (KR) - Kapolda DIY Irjen Pol Asep Suhendar meresmikan program Posko Kampung Kulonprogo Siap Amankan Warga (Kampung Kulo Siaga) di Mapolres Kulonprogo Polda DIY, Selasa (2/6). Peresmian ditandai pemukulan kentongan dan penandatanganan prasasti oleh kapolda disaksikan Kapolres Kulonprogo AKBP Tartono, Dandim 0731/ Kulonprogo Letkol Inf Dodit Susanto, Bupati Drs H Sutedjo dan Ketua DPRD Akhid Nuryati SE.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yulianto mengatakan, Kapolda DIY mengapresiasi inisiatif Kapolres Kulonprogo melakukan terobosan membuat program Posko 'Kampung Kulo Siaga' di 12 Polsek wilayah. Program ini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan di masyarakat menghadapi kondisi *New Normal* pada masa pandemi Covid-19.

Program tersebut lebih ke sistem pelaporan pendataan dan kegiatan secara *online* terkait Covid-19, baik berupa data pemudik, data isolasi, data pendistribusian bantuan, data masyarakat miskin dan data informasi perkembangan Covid-19 di wilayah Kulonprogo. Di beberapa tempat, diperoleh informasi yang menerima bantuan tidak merata

atau orang tertentu saja. Dengan program ini diharapkan dapat meminimalisasi hal tersebut. Sampai saat ini di Kulonprogo tidak ada permasalahan bantuan terkait Covid-19," kata Kombes Pol Yulianto.

Kapolda DIY mengapresiasi dibangunnya posko 'Kampung Kulo Siaga' karena Polres Kulonprogo merupakan yang pertama di wilayah Polda DIY membuat inovasi program. Posko yang terdapat di 12 Polsek wilayah merupakan sinergi-

tas antara Kapanewon, Koramil dan Gugus Tugas Covid-19 untuk mendapatkan dan menerima informasi serta keluhan masyarakat terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

"Program ini memberikan pengawasan efektif di masyarakat menghadapi kondisi *New Normal* pada masa pandemi Covid-19. Termasuk apabila ada kejadian kriminalitas dan gangguan kamtibmas langsung bisa dieliminasi dengan cepat," jelasnya. (Rul/M-4)-d



Irjen Pol Asep Suhendar didampingi AKBP Tartono meresmikan program 'Kampung Kulo Siaga'.

KR-DANI Ardiyanto

26 Kalurahan Cairkan Dana Desa

PENGASIH (KR)-Sebanyak 26 kalurahan di Kabupaten Kulonprogo telah mencairkan Dana Desa (DD) 100 persen. Tahun 2020 ini pencairan dana desa dilakukan 2 kali yaitu 60 persen dan 40 persen. Tahap I (60 persen) disalurkan pada bulan Februari 2020 lalu. Terkait DD ini, menurut Kementerian Keuangan, Kabupaten Kulonprogo mendapat predikat kinerja baik dalam penyaluran dan penyerapan DD 2019.

"Pada Kamis (28/5) lalu sebanyak 26 kalurahan sudah mengajalkan pencairan Dana Desa tahap II ke Dinas PMD Daldud dan KB. Yaitu dari Temon 7 kalurahan, Wates 4, Galur 2, Kalibawang 1, Kokap 1, Lendah 2, Nanggulan 2, Pengasih 4, Samigaluh 1, dan Sentolo 2. Lainnya proses pengajuan ke dinas, beberapa sudah masuk," terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD Daldud &

KB) Kabupaten Kulonprogo Sudarmanto SIP MSi, Senin (1/6).

Menurut Sudarmanto, KPPN sudah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada 28 Mei 2020 pukul 10.00 dan diharapkan sebelum pukul 14.00 Dana Desa sudah masuk ke RKD masing-masing kalurahan.

"Pencairan Dana Desa Tahap II diharapkan dapat mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat. Terdapat beberapa kalurahan yang belum dapat menyalurkan BLT DD disebabkan Dana Desa Tahap I tidak mencukupi," katanya sambil menambahkan tahapan proses *entry* persyaratan aplikasi Kemenkeu sebagian di DPMD Daldud KB dan BKAD sesuai Permenkeu baru.

Menteri Keuangan, lanjut Sudarmanto, telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.

07/2020 untuk mempercepat penyaluran dana desa tahap II. Percepatan pencairan Dana Desa tersebut terkait kebijakan tentang BLT bersumber dari Dana Desa. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan dalam tahapan pencairan dana tahap II.

"Khusus untuk 20 kabupaten termasuk salah satunya Kabupaten Kulonprogo berlaku ketentuan yakni pada tahap kedua, syarat pencairan dana meliputi Peraturan Bupati (Perbup) mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap kalurahan dan Perbup tentang perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap kalurahan, peraturan kalurahan mengenai APBKal, laporan realisasi penyerapan DD Tahun 2019, laporan realisasi dan penyerapan DD Tahap I 2020, laporan konvergensi stunting tingkat kalurahan," kata Sudarmanto. (Wid)-d